

BAB 1

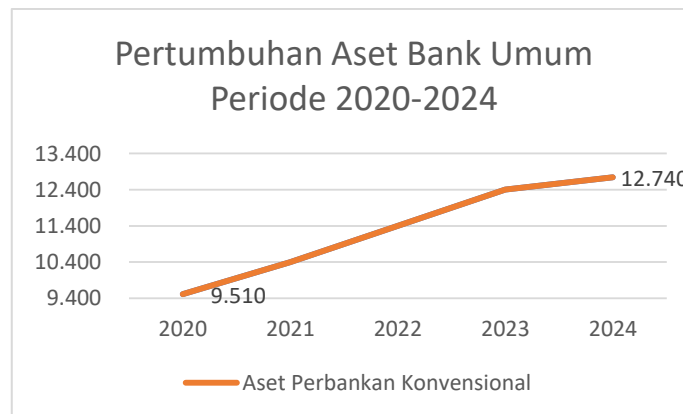
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian global mengalami dinamika yang kompleks dalam beberapa dekade terakhir, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk krisis keuangan tahun 2008 yang melanda hampir seluruh negara maju dan berkembang, kemudian dilanjutkan dengan pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020, serta ketidakpastian geopolitik yang berlangsung hingga saat ini. Kondisi ekonomi makro ini memberikan dampak signifikan terhadap kinerja sektor-sektor produktif di berbagai negara, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara (World Bank, 2023). Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara terus berupaya menjaga resiliensi di tengah fluktuasi pasar komoditas (Bank Indonesia, 2024).

Sektor jasa keuangan memiliki peranan strategis sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif (Kurniasari & Hariyani, 2022). Pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di atas 5% menjadi bukti efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi (Kemenkeu, 2023). Perbankan Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan total aset sektor perbankan nasional mencapai lebih dari Rp10.000 triliun, di mana bank umum mendominasi pangsa pasar dengan kontribusi sekitar 85% terhadap total aset perbankan (OJK, 2023).

Gambar 1. 1
Pertumbuhan Aset Bank Umum Periode 2020-2024



Sumber Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Data Diolah)

Peran ini semakin krusial mengingat mayoritas struktur pembiayaan usaha di Indonesia masih bergantung pada sektor perbankan (Siamat, 2022). Efisiensi operasional bank umum secara langsung akan memengaruhi kecepatan akselerasi pembangunan ekonomi nasional (Kasmir, 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RPPI) 2020-2025 untuk menghadapi tantangan masa depan (OJK, 2020). Roadmap ini menekankan pentingnya penguatan struktur industri perbankan agar lebih berdaya saing secara internasional (OJK, 2020).

Nilai perusahaan merupakan persepsi objektif pasar terhadap kinerja perbankan dan prospek keberlanjutan sebuah bank di masa depan (Brigham & Houston, 2019). Bagi sektor perbankan, nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap keamanan aset yang dikelola (Sartono, 2022). Fluktuasi nilai perusahaan pada Bank Umum di Bursa Efek Indonesia sering kali dipengaruhi oleh efisiensi manajemen dalam merespons dinamika pasar (Sudana, 2023).

Nilai perusahaan dalam kerangka *theory of the firm* dipahami sebagai sasaran utama yang harus dimaksimumkan perusahaan, bukan sekadar laba jangka pendek. *Theory of the firm* menjelaskan bahwa perusahaan pada awalnya dipandang bertujuan memaksimumkan laba sekarang, tetapi kemudian berkembang bahwa tujuan jangka panjang yang lebih relevan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan (*value of the firm*) bagi pemegang saham (Salvatore, 2005).

Secara praktis, nilai perusahaan tercermin dari bagaimana pasar menilai keseluruhan kinerja dan prospek suatu entitas, yang biasanya diukur melalui indikator pasar seperti harga saham, *price to book value* (PBV), *price earning ratio* (PER), atau kapitalisasi pasar (Brigham & Houston, 2019). Indikator-indikator tersebut bukan hanya menangkap informasi tentang profitabilitas, tetapi juga memasukkan faktor lain seperti struktur modal, kebijakan dividen, kualitas tata kelola, risiko bisnis, serta reputasi keberlanjutan perusahaan (Brigham & Houston, 2019).

Pada perkembangan terkini, harga saham bank umum di Indonesia masih menunjukkan pergerakan yang fluktuatif seiring dinamika pasar keuangan domestik dan global (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Maret 2026 ditutup pada level 7.048,22, atau terkoreksi 14,42% secara bulanan dan 18,49% secara *year-to-date*, sementara investor asing membukukan net sell sebesar Rp23,34 triliun di pasar saham (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan harga saham, termasuk saham-saham

perbankan, masih sangat dipengaruhi oleh volatilitas pasar dan perubahan sentimen investor (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi harga saham perbankan saat ini belum sepenuhnya stabil karena masih sangat sensitif terhadap tekanan eksternal dan psikologi pasar (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Meskipun demikian, tekanan pada harga saham perbankan tidak sepenuhnya mencerminkan pelemahan fundamental industri perbankan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa pada Februari 2026 kredit perbankan masih tumbuh 9,37% secara tahunan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,18% secara tahunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Selain itu, kualitas aset dan profitabilitas industri perbankan tetap terjaga, yang tercermin dari rasio NPL gross sebesar 2,17%, ROA sebesar 2,37%, serta CAR sebesar 25,83% (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Bahkan, Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK pada triwulan I-2026 menunjukkan Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) sebesar 56 atau berada pada zona optimis (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa secara fundamental sektor perbankan masih berada dalam kondisi yang kuat, sehingga penurunan atau fluktuasi harga saham lebih mencerminkan respons pasar jangka pendek dibandingkan penurunan kinerja industri perbankan itu sendiri (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

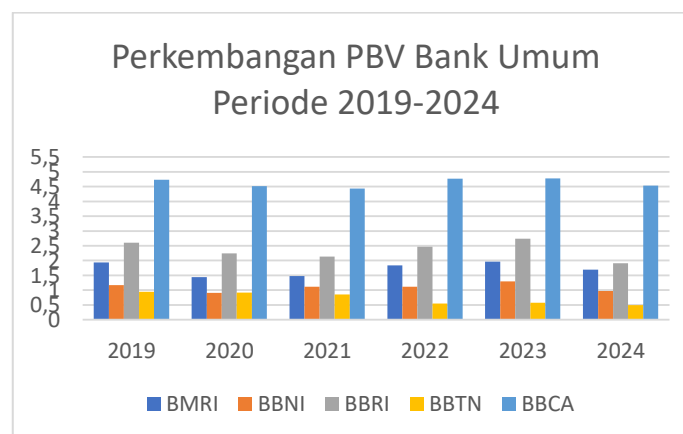
Dari sisi makroekonomi, Bank Indonesia menyatakan bahwa Rapat Dewan Gubernur pada 16–17 Maret 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate pada level 4,75% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian

sasaran inflasi di tengah memburuknya kondisi global (Bank Indonesia, 2026). Bank Indonesia juga mencatat bahwa pada Maret 2026 investasi portofolio mengalami net outflows sebesar USD1,1 miliar akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global (Bank Indonesia, 2026). Di samping itu, nilai tukar rupiah pada 16 Maret 2026 berada pada level Rp16.985 per dolar AS, yang menunjukkan bahwa tekanan eksternal masih menjadi faktor penting dalam memengaruhi persepsi investor di pasar saham (Bank Indonesia, 2026). Dengan demikian, kondisi harga saham perbankan saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja internal bank, tetapi juga oleh kebijakan moneter, arus modal asing, dan stabilitas makroekonomi nasional (Bank Indonesia, 2026; Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan harga saham perbankan merupakan hasil interaksi antara faktor mikro perusahaan dan faktor makroekonomi, sehingga pergerakannya tidak dapat dilepaskan dari situasi ekonomi nasional maupun global (Bank Indonesia, 2026; Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Fenomena naik turunnya nilai perusahaan menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Penurunan nilai perusahaan yang berkepanjangan kerap berujung pada memburuknya kinerja hingga berakhir pada penghentian operasi perusahaan, seiring merosotnya tingkat kepercayaan investor. Konsep pasar modal dimana nilai perusahaan tercermin melalui harga saham yang terus bergerak mengikuti perubahan kondisi internal perusahaan maupun faktor eksternal, sehingga berpotensi mengalami fluktuasi yang tajam dari waktu ke waktu. Pola pergerakan harga saham yang demikian juga tampak pada lima bank umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni Bank Negara Indonesia

(BBNI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Tabungan Negara (BMRI), dan Bank Central Asia (BBCA), yang menunjukkan dinamika harga saham yang tidak stabil dalam beberapa periode perdagangan terakhir dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 1. 2
Perkembangan PBV Bank Umum Periode 2019-2024



Sumber : Laporan keuangan masing-masing Bank Umum (Data Diolah)

Meskipun bukan merupakan bank umum milik pemerintah, Bank Central Asia (BBCA) justru konsisten mencatatkan rasio *Price to Book Value* (PBV) tertinggi di sektor perbankan Indonesia (Frensidy, 2021). Berbagai kajian menunjukkan bahwa PBV BBCA rata-rata berada pada kisaran 3,5–4,5 kali nilai buku, jauh di atas PBV bank-bank BUMN seperti BBRI, BMRI, dan BBNI yang umumnya hanya berkisar 1–2,5 kali nilai buku (Frensidy, 2021). Fenomena ini mengindikasikan adanya *valuation* premium yang diberikan pasar kepada BBCA karena kualitas fundamental dan prospek laba yang dinilai lebih kuat dibandingkan bank pemerintah (Susanti, 2021).

Konteks kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada bank-bank BUMN, tingginya PBV BBCA menghadirkan anomali (INDEF,

2025). Penempatan dana tersebut terbukti memperkuat likuiditas dan membantu bank-bank pemerintah menjaga margin profitabilitas, sehingga berkontribusi pada perbaikan persepsi pasar dan kenaikan PBV mereka (INDEF, 2025). Namun, fakta bahwa PBV BBKA tetap berada jauh di atas bank pemerintah meskipun tidak menerima fasilitas penempatan dana yang sama menunjukkan bahwa faktor fundamental internal seperti efisiensi operasional, kualitas aset, dan tata kelola memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk valuasi pasar.

Fenomena harga saham di pasar modal Indonesia saat ini menunjukkan dinamika yang cukup tajam. Pada triwulan pertama 2026, IHSG sempat mengalami koreksi mendekati 17 persen secara tahunan yang mencerminkan meningkatnya volatilitas dan tekanan jual di pasar (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Di tengah tekanan eksternal berupa pengetatan likuiditas global dan meningkatnya risiko geopolitik, saham-saham perbankan besar juga cenderung tertekan, meskipun kinerja laba perbankan secara agregat masih mencatat pertumbuhan yang positif (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pergerakan harga saham tidak hanya merefleksikan fundamental perusahaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sentimen dan ekspektasi investor terhadap risiko pasar ke depan.

Salah satu strategi internal yang relevan adalah penerapan *green index*, yang tercermin melalui pengukuran *Green Banking Disclosure Index* sebagai bentuk komitmen bank terhadap keberlanjutan lingkungan (Buallay, 2022; Ernawati, 2024). Secara teoretis, *Green Banking* berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh legitimasi publik dengan mengintegrasikan aspek lingkungan

ke dalam operasional perbankan, sehingga bank dipandang tidak hanya mengejar profit namun juga memenuhi tuntutan keberlanjutan (Rahmawati, 2025). Di Indonesia, penerapan *Green Banking* merupakan langkah strategis untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan target transisi menuju ekonomi hijau yang dicanangkan pemerintah melalui berbagai kerangka kebijakan keuangan berkelanjutan (Bimantara, 2024). Sejalan dengan itu, berbagai kajian menegaskan bahwa *Green Banking* tidak hanya berkontribusi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memperkuat reputasi bank dan membuka peluang pembiayaan baru yang potensial meningkatkan kinerja jangka panjang (Candera, 2025).

Di tengah kompetisi global, orientasi bisnis perbankan telah bergeser dari sekadar pengejaran laba (*profit*) menuju keberlanjutan (*sustainability*), sehingga praktik *Green Banking* menjadi salah satu pilar strategi korporasi perbankan modern (Alghafes, 2024). Paradigma *Green Banking* kini menjadi kewajiban strategis bagi institusi keuangan untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam operasional dan keputusan pemberian kredit atau pembiayaan (Alghafes, 2024). Implementasi *green banking index* di Indonesia didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021–2025 yang menekankan peran lembaga keuangan dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Pergeseran orientasi perbankan menuju keberlanjutan tersebut dapat dijelaskan melalui *Triple Bottom Line Theory* yang dikembangkan oleh Elkington (1997). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan

tidak hanya dinilai dari kemampuan menghasilkan keuntungan ekonomi (*profit*), tetapi juga dari kemampuan perusahaan memperhatikan kepentingan sosial (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*) secara seimbang (Elkington, 1997). Pada konteks industri perbankan, dimensi *planet* tercermin melalui penerapan *Green Banking*, seperti pembiayaan ramah lingkungan, efisiensi penggunaan energi dan sumber daya, digitalisasi layanan, serta pengelolaan risiko lingkungan dalam aktivitas pembiayaan (Elkington, 1997; Bose et al., 2018). Sementara itu, dimensi *profit* menunjukkan bahwa bank tetap harus mampu mempertahankan kinerja keuangan yang memadai agar berbagai komitmen keberlanjutan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan (Elkington, 1997).

Keterkaitan antara dimensi *planet* dan *profit* menjadi relevan dengan fokus penelitian ini karena penerapan *Green Banking* belum tentu secara langsung meningkatkan Nilai Perusahaan apabila manfaat lingkungan yang dihasilkan belum disertai dengan kemampuan perusahaan menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dinilai oleh investor. Berdasarkan *Triple Bottom Line Theory*, penciptaan nilai perusahaan dalam jangka panjang membutuhkan keseimbangan antara komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan kemampuan perusahaan mempertahankan kinerja ekonominya (Elkington, 1997). Dalam penelitian ini, *Green Banking Index* merepresentasikan perhatian bank terhadap dimensi *planet*, sedangkan Profitabilitas mencerminkan kemampuan ekonomi perusahaan pada dimensi *profit*. Oleh karena itu, tingkat Profitabilitas menjadi relevan untuk diuji sebagai variabel pemoderasi karena kemampuan bank menghasilkan laba dapat

menentukan sejauh mana penerapan *Green Banking* mampu diterjemahkan investor menjadi peningkatan Nilai Perusahaan.

Pengukuran komitmen ini lazimnya menggunakan *Green Banking Disclosure Index* (GBDI), yang mencakup indikator seperti produk hijau, proses internal ramah lingkungan, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan (Bose, 2018).

Berdasarkan teori sinyal (*signaling theory*), pengungkapan indeks perbankan hijau diharapkan mampu memberikan informasi positif kepada investor mengenai komitmen bank terhadap pengelolaan risiko lingkungan (Rohmah, 2024). Investor cenderung memberikan valuasi lebih tinggi pada bank yang memiliki risiko lingkungan rendah, karena dianggap lebih tangguh dalam menghadapi regulasi ketat dan transisi kebijakan iklim di masa depan (Rohmah, 2024).

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasi *Green Banking* masih menghadapi hambatan besar, di mana kajian terbaru menemukan hanya sebagian kecil bank besar di Indonesia yang dipersepsikan publik telah menerapkan prinsip keberlanjutan secara relatif matang, sementara mayoritas masih berada pada tahap awal pengintegrasian aspek lingkungan (Rina & Yuliani, 2023). Fenomena terbaru menunjukkan munculnya krisis kepercayaan terhadap klaim keberlanjutan di sektor perbankan, yang tercermin dari temuan bahwa kebijakan ESG di atas kertas belum sepenuhnya selaras dengan praktik pembiayaan di lapangan (Hermanto, 2024).

Hasil Indeks Investasi Hijau III 2025 yang dirilis Indonesian *Working Group on Forest Finance* (IWGFF) mengungkap adanya celah *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan bank, di mana peningkatan skor ESG pada dokumen resmi tidak selalu diikuti perbaikan kualitas proyek yang dibiayai (Indonesian Working Group on Forest Finance, 2025; Ayuningtyas, 2025). Bahkan, laporan lain mencatat bahwa sektor perbankan dan layanan keuangan menjadi penyumbang kasus *greenwashing* terbesar kedua di dunia dengan sekitar 12 persen dari total insiden yang teridentifikasi pada 2023, menempatkan Asia termasuk Indonesia sebagai salah satu kawasan dengan risiko reputasi ESG yang signifikan (Infobank, 2025).

Fenomena ini menciptakan keraguan di kalangan investor mengenai keaslian skor *Green Banking Index* yang dipublikasikan, seiring meningkatnya temuan praktik *greenwashing* di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan (Infobank, 2025). Dampaknya, sinyal hijau yang seharusnya positif kini sering kali direspons dengan skeptisisme oleh pasar modal, karena investor menilai sebagian klaim keberlanjutan belum didukung oleh perubahan riil dalam portofolio pembiayaan (Wicaksono & Bhawono, 2025).

Greenwashing ini menciptakan anomali dalam penilaian nilai perusahaan, sebab informasi mengenai komitmen hijau yang secara teori seharusnya meningkatkan nilai perusahaan justru bisa menjadi bumerang jika pasar menganggap pengungkapan tersebut sebagai informasi palsu atau manipulatif (Au, 2023). Pada kondisi tersebut, bukannya menaikkan valuasi, pengungkapan hijau yang diragukan keasliannya berpotensi menurunkan kredibilitas bank dan

meningkatkan diskon risiko yang dikenakan investor terhadap saham bank tersebut (Investor-IDN, 2025).

Perkembangan bank umum di Indonesia tidak hanya tercermin dari ekspansi aset dan penyaluran kredit, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan laba dan konsistensi dalam membagikan dividen kepada pemegang saham (Indriani, 2025). Di samping faktor non-keuangan, kebijakan dividen tetap menjadi instrumen keuangan klasik yang sangat diperhatikan investor karena berfungsi sebagai mekanisme pembagian laba sekaligus alat komunikasi manajerial kepada pasar (Indriani, 2025). Kebijakan dividen yang stabil memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki arus kas yang sehat dan prospek pertumbuhan yang baik, sehingga secara positif dapat meningkatkan nilai perusahaan (Wulandari, 2025). Kebijakan dividen tetap menjadi salah satu sinyal utama (*signaling theory*) bagi pasar mengenai stabilitas arus kas dan keyakinan manajemen terhadap keberlanjutan kinerja laba bank umum (Syafitri, 2025).

Kebijakan dividen perbankan yang diarahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisiner Bulanan (RDK) Maret 2026 merefleksikan upaya regulator untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dengan kebutuhan penguatan permodalan bank di tengah lanskap risiko global yang semakin kompleks, sebagaimana dinyatakan dalam Siaran Pers RDK Maret 2026 tanggal 6 April 2026. Mengacu pada stabilitas sistem keuangan, OJK menempatkan permodalan perbankan sebagai lini pertahanan pertama terhadap guncangan eksternal, termasuk eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga energi, dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan global,

sehingga kebijakan dividen tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen distribusi laba, tetapi sebagai bagian integral dari manajemen ketahanan sektor perbankan Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh tekanan biaya kredit, kebutuhan memperkuat permodalan, dan sikap kehati-hatian manajemen bank umum di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik, sebagaimana juga tercermin dalam laporan profil industri perbankan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Pada tingkat perusahaan, kebijakan dividen juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi minat investor terhadap saham perbankan (PT Bank Central Asia Tbk, 2026; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2026). PT Bank Central Asia Tbk menetapkan dividen tunai sebesar Rp336,00 per saham atau setara 72% dari laba bersih tahun buku 2025, serta membuka peluang pembagian dividen interim hingga tiga kali pada tahun 2026 apabila kondisi keuangan memungkinkan (PT Bank Central Asia Tbk, 2026). Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menetapkan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp346,00 per saham, dengan cum dividend pasar reguler dan negosiasi pada 20 April 2026 serta tanggal pembayaran dividen pada 8 Mei 2026 (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2026). Keputusan pembagian dividen tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dividen tetap menjadi sinyal penting bagi investor, sehingga berpotensi memengaruhi harga saham dan pada akhirnya mencerminkan nilai perusahaan perbankan (PT Bank Central Asia Tbk, 2026; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2026). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa

kebijakan dividen memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi positif investor, yang selanjutnya dapat memperkuat harga saham dan meningkatkan nilai perusahaan (PT Bank Central Asia Tbk, 2026; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2026).

Di saat yang sama, sentimen negatif terhadap industri keuangan secara luas ikut memengaruhi persepsi risiko investor terhadap bank umum, meskipun kasus *fraud* yang mengemuka terjadi pada lembaga keuangan lain di luar perbankan (CNN Indonesia, 2026). Skandal besar seperti kasus PT Dana Syariah Indonesia yang mengandung dugaan proyek fiktif, pola mirip skema Ponzi, dan kerugian hingga sekitar Rp2,4 triliun telah memperburuk kepercayaan publik terhadap sektor keuangan secara umum, terutama terkait transparansi dan perlindungan investor (Kompas, 2026).

Seiring kondisi pasar yang volatil ini, upaya untuk menjaga dan meningkatkan Nilai Perusahaan menjadi tantangan utama. Penggunaan *Green Banking Index* (GBI) muncul sebagai strategi untuk memberikan sinyal keberlanjutan jangka panjang bagi investor, mengingat pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia saat ini dinilai masih belum memadai. Selain itu, Kebijakan Dividen berperan sebagai instrumen untuk menstabilkan ekspektasi investor di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal dan regulasi keuangan (Winardi, 2025).

Hubungan antara penerapan perbankan hijau dan pembagian dividen terhadap nilai perusahaan sangat bergantung pada performa internal bank. Kondisi tersebut juga selaras dengan *Triple Bottom Line Theory* yang menekankan

perlunya keseimbangan antara pencapaian aspek lingkungan (*planet*) dan ekonomi (*profit*) dalam menciptakan keberlanjutan perusahaan (Elkington, 1997). Dalam hubungan antara *Green Banking Index* dan Nilai Perusahaan, Profitabilitas menjadi penting karena bank yang memiliki kemampuan menghasilkan laba lebih tinggi mempunyai kapasitas finansial yang lebih besar untuk membiayai implementasi praktik ramah lingkungan tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap kinerja ekonominya. Dengan demikian, Profitabilitas dapat menentukan kuat atau lemahnya pengaruh penerapan *Green Banking* terhadap Nilai Perusahaan.

Profitabilitas menjadi variabel pemoderasi yang sangat menentukan bank yang tetap mampu mencetak laba di tengah kenaikan biaya dana dan pelemahan daya beli nasabah akan memiliki kapasitas lebih besar untuk menyerap risiko pasar sekaligus mempertahankan kepercayaan pemegang saham (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Dengan demikian, penelitian ini krusial untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Green Banking Index* dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi di tengah dinamika pasar yang volatil.

Terkait konteks kebijakan dividen dan nilai perusahaan, penelitian Muninggarsih (2025) menyatakan bahwa kebijakan dividen yang diukur dengan *dividend payout ratio* dapat meningkatkan nilai perusahaan karena memberikan sinyal positif kepada investor mengenai stabilitas laba dan prospek perusahaan (Muninggarsih, 2025). Namun, temuan lain pada perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan institusional tidak selalu

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, dan bank yang lebih besar cenderung memiliki *dividend payout ratio* yang lebih tinggi (Hidayat & Rahma, 2024). Penelitian Gautama (2024) juga menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sementara variabel moderasi seperti struktur modal dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut tergantung pada kondisi perusahaan (Gautama, 2024).

Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang digunakan, yang biasanya diproksi dengan return on assets (ROA) dan dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi penilaian investor terhadap nilai perusahaan (Brigham & Houston, 2019). Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung lebih menarik bagi investor, karena dianggap mampu menghasilkan laba yang stabil dan berkelanjutan.

Meningkatnya tuntutan regulasi dan tekanan pasar agar bank menerapkan keuangan berkelanjutan dan memperkuat pengungkapan *Green Banking*, sejalan dengan kebijakan keuangan berkelanjutan OJK dan tren global keuangan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021; Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Di sisi lain, bank umum juga menghadapi tekanan untuk menjaga kinerja profitabilitas dan memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor melalui kebijakan dividen, di tengah persaingan yang ketat dan volatilitas kondisi ekonomi (Aziza, 2025). Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting apakah peningkatan pengungkapan *Green Banking* dan kebijakan dividen benar-benar direspons pasar melalui peningkatan nilai perusahaan bank umum, serta sejauh

mana profitabilitas mampu memoderasi hubungan tersebut (Claduri, 2025; Widiyanti, 2025).

Hasil penelitian yang beragam mengenai pengaruh *Green Banking* terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa topik ini masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Claduri (2025), menunjukkan bahwa pengungkapan *Green Banking* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sementara penelitian lain, seperti yang ditemukan oleh Aziza (2025), menunjukkan hasil yang tidak signifikan jika tidak didukung oleh tata kelola yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun *Green Banking* memiliki potensi untuk mempengaruhi nilai perusahaan, hasilnya belum dapat dipastikan secara konsisten. Oleh karena itu, pentingnya penelitian lebih lanjut untuk lebih memahami mekanisme dan kondisi yang memengaruhi hubungan antara *Green Banking* dan nilai perusahaan.

Profitabilitas merupakan variabel kunci yang mencerminkan efisiensi bank dalam mengelola aset dan modalnya. Bank dengan profitabilitas tinggi memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan kegiatan *Green Banking* dan membayar dividen secara berkelanjutan (Banjarnahor & Mulyani, 2023). Bank umum dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung mampu mengimplementasikan *Green Banking* secara konsisten dan membagikan dividen secara optimal, sehingga meningkatkan nilai perusahaan (Alghafes et al., 2024). Berdasarkan banyak penelitian, profitabilitas terbukti mampu memoderasi hubungan antara faktor internal dan nilai perusahaan, ketika sebuah bank mampu membukukan laba yang kuat, pengungkapan *Green Banking* akan dipandang lebih kredibel karena

perusahaan dianggap memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk benar-benar menjalankan program hijau (Aldoprata & Trisnawati, 2025).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *Green Banking Index* dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, dengan menempatkan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada bank umum di Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah di tengah isu *greenwashing* dan perlambatan dividen, investor masih mengapresiasi kinerja keberlanjutan dan kebijakan finansial bank umum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Green Banking Index* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum di Indonesia periode 2020-2024?
2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum di Indonesia 2020-2024?
3. Apakah profitabilitas mampu memoderasi *Green Banking Index* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum di Indonesia periode 2020-2024?
4. Apakah profitabilitas mampu memoderasi kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum di Indonesia periode 2020-2024?

5. Apakah *Green Banking Index* dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada Bank Umum di Indonesia 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah *Green Banking Index* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum di Indonesia periode 2020–2024.
2. Untuk menganalisis apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum di Indonesia periode 2020–2024.
3. Untuk menganalisis apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *Green Banking Index* terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum di Indonesia periode 2020–2024.
4. Untuk menganalisis apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum di Indonesia periode 2020–2024.
5. Untuk menganalisis apakah *Green Banking Index* dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum di Indonesia 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah literatur, pengembangan ilmu akuntansi dan acuan penelitian pada bidang akuntansi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Green Banking Index*, Kebijakan Dividen, Nilai Perusahaan dan Profitabilitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi manajemen Bank Umum di Indonesia, menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi implementasi *green index*, penetapan kebijakan dividen, dan pengelolaan profitabilitas untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- b. Bagi investor dan pemegang saham, memberikan informasi tambahan mengenai relevansi *Green Banking Index*, kebijakan dividen, dan profitabilitas dalam pengambilan keputusan investasi pada saham Bank Umum di Indonesia.
- c. Bagi regulator (OJK, DSN-MUI, dan pemangku kepentingan terkait): menjadi masukan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan pedoman terkait keuangan berkelanjutan, pelaporan *green index*, serta penguatan tata kelola Bank Umum di Indonesia.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca dan sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.